

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM KERANGKA TEORI MANDAT HANNA F. PITKIN

Amalia Pratiwi¹, Stephani Widia Rianti Sipangkar², Adinda Nazla Rizky Ramadhani³, Santi Mulyady⁴, Muhammad Rayyan Hylmi⁵, Restu Rahmawati⁶

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 2025

Revised April 2025

Accepted April 2025

Available online April 2025

2310413002@mahasiswa.u

pnvj.ac.id¹,

2310413015@mahasiswa.u

pnvj.ac.id²,

2310413019@mahasiswa.u

pnvj.ac.id³,

2310413020@mahasiswa.u

pnvj.ac.id⁴,

2310413140@mahasiswa.u

pnvj.ac.id⁵,

restu.rahmawati@upnvj.ac

[.id](mailto:restu.rahmawati@upnvj.ac)⁶



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstract. *This article examines the implementation of the Free Nutritional Meal Program in Indonesia from the perspective of Hanna Pitkin's mandate theory. The purpose of this study is to assess the extent to which the program meets the rights and needs of the community and how it implements the principle of representation. Qualitative analysis and interviews were used to collect data from various relevant sources. The results show that although the program is intended to support education and improve child nutrition, there are several problems in its implementation. For example, there is no coordination between institutions and lack of community participation. To ensure that the social mandate can be effectively fulfilled, this article recommends increasing transparency, participation, and accountability in the implementation of the program.*

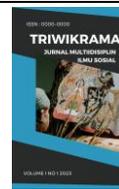
Keywords: *Hanna Pitkin; Social Welfare; Free Meal Program; Representation; Mandate Theory*

Abstrak. Artikel ini mengkaji pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dari perspektif teori mandat Hanna Pitkin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana program ini memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat serta bagaimana ia menerapkan prinsip representasi. Analisis kualitatif dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program dimaksudkan untuk mendukung pendidikan dan meningkatkan gizi anak, terdapat beberapa masalah saat menjalankannya. Misalnya, tidak ada koordinasi antar lembaga dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk memastikan bahwa mandat sosial dapat terpenuhi secara efektif, artikel ini merekomendasikan peningkatan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam implementasi program.

Kata Kunci: *Hanna Pitkin; Kesejahteraan Sosial; Program Makan Bergizi Gratis; Representasi; Teori Mandat*

INTRODUCTION

Fenomena dukungan rakyat untuk memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada pemilu 2024 juga tidak terlepas dari daya tarik program kerja yang diusung yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Janji kampanye tersebut terbukti dapat menarik simpati dari masyarakat terutama masyarakat yang berasal dari keluarga rentan dan warga di daerah 3T



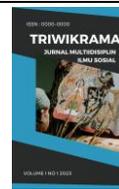
(terdepan, terluar, tertinggal) karena dinilai dapat membantu meringankan dalam hal pangan. Dalam hal ini, dukungan rakyat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mendapatkan mandat dari rakyat berupa tuntutan perwujudan implementasi program makan bergizi gratis yang dijanjikan pada kampanye selama pemilu. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu inisiatif unggulan yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Inisiatif ini berfokus pada penyediaan makanan bergizi tanpa biaya untuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Dalam visi besar Kabinet Prabowo, MBG dimaksudkan tidak hanya untuk mengurangi angka stunting dan malnutrisi, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan nasional melalui generasi yang sehat dan produktif.

Namun, di tengah harapan akan manfaat yang dijanjikan, program MBG juga menghadapi berbagai kritik dan polemik di masyarakat. Beberapa pihak meragukan kesiapan anggaran negara untuk mendanai program besar ini secara berkelanjutan, terutama dalam konteks tekanan fiskal pasca pandemi. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pelaksanaan program ini dapat menyebabkan ketimpangan antar wilayah jika tidak dilakukan secara merata. Kritik juga muncul dari aspek teknis pelaksanaan, seperti kesiapan infrastruktur sekolah, mekanisme distribusi makanan, serta potensi korupsi dalam pengadaan bahan makanan. Dalam konteks ini, penting untuk menilai apakah program tersebut benar-benar mencerminkan mandat yang diberikan oleh rakyat atau sekadar alat politik elektoral.

Untuk menangani persoalan tersebut, teori representasi politik yang dikembangkan oleh Hanna Pitkin, khususnya konsep representasi sebagai mandat (*mandate theory of representation*), dapat menjadi kerangka analisis yang relevan. Menurut Pitkin, representasi sebagai mandat menempatkan wakil rakyat atau pemegang kekuasaan sebagai pelaksana kehendak rakyat yang telah memilih mereka melalui pemilu. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil, termasuk MBG, seharusnya mencerminkan janji kampanye yang didukung oleh konstituen dan diterapkan secara akuntabel. Analisis dalam kerangka ini akan membantu mengevaluasi sejauh mana program MBG benar-benar merupakan manifestasi dari mandat rakyat, serta bagaimana pelaksanaannya dapat mencerminkan akuntabilitas politik dalam sistem demokrasi perwakilan.

Dalam bukunya yang ditulis pada tahun 1967, "The Concept of Representation", Hanna Pitkin menawarkan teori mandat yang sangat penting untuk memahami hubungan antara wakil dan konstituen. Pitkin membedakan beberapa jenis mandat, salah satunya adalah mandat politik, yang mengharuskan wakil untuk bertindak demi kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Teori ini sangat relevan dalam konteks program makanan bergizi gratis karena menekankan betapa pentingnya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi.

Pitkin berpendapat bahwa wakil memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kesejahteraan masyarakat selain berfungsi sebagai suara bagi konstituen. Hal ini menjadi penting dalam analisis program makanan bergizi karena pemerintah tidak hanya menyediakan makanan tetapi juga memastikan bahwa makanan tersebut memenuhi standar nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, evaluasi keberhasilan



program dapat dibantu oleh teori mandat. Dengan memahami tanggung jawab yang diemban, penilai dapat menilai sejauh mana program memenuhi harapan masyarakat dan apakah pemerintah telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena itu, teori ini tidak hanya relevan dalam konteks politik, tetapi juga sangat bermanfaat untuk menganalisis kebijakan publik dan program sosial seperti penyediaan makanan bergizi gratis.

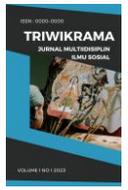
Salah satu program penting yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak, terutama anak-anak yang bersekolah, adalah program makan bergizi gratis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa program ini dapat meningkatkan kesehatan anak dan mengurangi angka kelaparan. Menurut Smith dan Haddad (2015), program makanan bergizi tidak hanya meningkatkan gizi seseorang tetapi juga mempengaruhi partisipasi dan prestasi akademik di sekolah.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan yang sehat. Program Makanan Sekolah (PMS), yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang sehat selama waktu sekolah, adalah salah satu contohnya. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020), program ini juga membantu siswa lebih sering hadir di sekolah, terutama di wilayah yang sangat miskin. Namun, program ini sering menghadapi masalah. Menurut beberapa penelitian, kualitas dan ketersediaan makanan dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, pengelola program mungkin tidak bekerja dengan baik karena kurangnya pelatihan dan kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah.

Untuk mencapai tujuan kebijakan publik, implementasi program biasanya merupakan langkah penting. Menurut Pritchett dan Woolcock (2004), banyak program yang direncanakan dengan baik dapat gagal ketika dilaksanakan. Ini dapat terjadi karena banyak hal, seperti kurangnya koordinasi antar institusi, sumber daya yang terbatas, dan tidak memahami konteks lokal. Tantangan ini sangat relevan dalam konteks program makan bergizi gratis karena banyaknya masalah yang terlibat dalam memberikan makanan bergizi kepada anak-anak di sekolah.

Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan—pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat—adalah penting untuk implementasi yang sukses. Jika tidak ada koordinasi yang baik, program dapat menghadapi masalah seperti distribusi makanan yang tidak lancar, kualitas makanan yang tidak konsisten, dan kurangnya partisipasi sekolah. Menurut penelitian, program yang melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhasil (Fowler, 2013). Kapasitas sumber daya manusia juga penting. Tenaga pendidik dan pengelola program harus dilatih tentang gizi dan penyajian makanan yang sehat. Tanpa instruksi yang memadai, ada risiko makanan yang disediakan tidak memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak. Hal ini dapat berdampak pada kinerja program secara keseluruhan.

Untuk mengukur dampak dari program makan bergizi gratis, evaluasi program yang sistematis sangat penting. Bloom et al. (2011) menekankan bahwa evaluasi harus mencakup ukuran kinerja yang jelas dan teknik pengumpulan data yang efektif. Metode evaluasi ini dapat membantu menentukan sejauh mana program mencapai tujuannya untuk meningkatkan gizi anak-anak. Evaluasi juga membantu dalam menentukan komponen keberhasilan program,



seperti ketersediaan sumber daya dan partisipasi masyarakat. Pemangku kepentingan dapat memahami dampak program secara lebih mendalam dan melakukan perubahan melalui analisis yang menyeluruh. Oleh karena itu, evaluasi yang efektif tidak hanya mengukur hasil tetapi juga membangun dasar untuk perbaikan jangka panjang dalam pelaksanaan program.

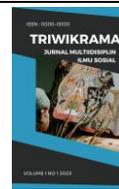
Penelitian oleh Wahyu Aji (2025) menunjukkan temuan bahwa implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah dinilai terlalu tergesa-gesa dengan perubahan konsep yang tidak konsisten, seperti pemangkasan anggaran per.porsi yang berawal dari Rp15,000 berubah menjadi Rp10,000. Selain itu penelitian ini juga menyoroti keterbatasan distribusi ke beberapa daerah terpencil berpotensi menyebabkan kecurangan bahkan penggelapan dana sehingga program pemerintah tidak menyentuh keseluruhan target program. Meskipun memiliki beberapa kritik, program ini dianggap masih memberikan dampak positif seperti peningkatan angka kehadiran siswa dan potensi penurunan stunting.

Maharani et al (2024) meneliti mengenai "Peran Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Janji Kampanye Prabowo-Gibran dan Realisasinya". Penulis berpendapat bahwa program ini bersifat progresif dan dapat meningkatkan akses pendidikan tetapi juga dapat menguatkan perekonomian UMKM, koperasi dan bumi desa. Penulis juga menyoroti bahwa tantangan besar dalam implementasinya berasal dari keterbatasan anggaran yang diperkirakan akan mencapai Rp 450 Triliun dengan risiko merusak stabilitas ekonomi. Temuan dalam penelitian ini adalah penurunan angka kelaparan, peningkatan partisipasi sekolah serta penurunan stigma sosial. Secara ekonomi, program ini mendorong pertumbuhan sektor pangan serta distribusi lokal.

Ritonga et al (2025) meneliti mengenai peran komunikasi pembangunan dalam mendukung regulasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan dari penelitian ini adalah komunikasi pembangunan berperan penting dalam mensosialisasikan program pemerintah ini. Namun, implementasi dari sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini masih mengalami kendala terutama antar instansi dan pemangku kepentingan. Peneliti menyarankan agar peningkatan kolaborasi antara pemerintah, media dan masyarakat serta memanfaatkan media digital. Studi ini merekomendasikan bahwa pendekatan komunikasi pembangunan yang efektif dibutuhkan untuk mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat agar terbentuknya rasa percaya dan efektivitas program.

Penelitian Qomarullah et al (2025) menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak positif terhadap kesehatan siswa jangka panjang di sekolah yang telah melaksanakan program MBG. Program ini juga memberikan dampak peningkatan daya tahan tubuh diukur dari berkurangnya frekuensi ketidakhadiran siswa karena sakit. Dengan dampak positif yang diberikan program MBG memiliki potensi untuk meningkatkan kesehatan anak sekolah dengan catatan perbaikan regulasi untuk memastikan terpenuhinya gizi.

Hasil riset Septiani et al (2024) menunjukkan dari 3 narasumber yaitu tenaga pendidik, pelajar, dan satu orangtua murid terdapat pro kontra. Walaupun begitu, ketiga nya sama-sama setuju apabila program MBG dilaksanakan dengan tujuan meringankan pengeluaran masyarakat terutama keluarga dengan ekonomi menengah kebawah. Penulis juga menekankan banyak pihak yang mengkritik anggaran program ini meskipun memang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perekonomian lokal.



Adanya rencana pengurangan subsidi BBM demi mendukung program makan siang gratis dinilai dapat menyebabkan pembekakan defisit anggaran dan potensi inflasi. Menurut penelitian Fitria et al (2024) pengurangan subsidi BBM yang diusul oleh Prabowo Subianto berpotensi menghasilkan dampak negatif daripada manfaat seperti kenaikan harga akibat efek domino. Untuk memastikan program berhasil efektif pemerintah diharapkan lebih memperhatikan jangkauan target, perencanaan anggaran, dan mitigasi dampak negatif

Dari penelitian sebelumnya kurang ditemukan bagaimana program MBG dalam aspek teori representasi politik Hanna Pitkin terutama konsep mandat. Belum banyak studi yang mengevaluasi sejauh mana program ini berjalan dan menjadi representasi pemilih presiden Prabowo sebagai realisasi janji kampanye sebagai bentuk kemauan rakyat yang diwakili. Oleh sebab itu, penulis mendalami bagaimana implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk mandat rakyat dan mengevaluasi pelaksanaan program.

Penulis melihat pentingnya untuk mengkaji lebih dalam bagaimana program makan bergizi gratis ini dirancang dan dijalankan, tidak hanya sebagai kebijakan publik semata, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan mandat politik dari pemimpin terpilih kepada rakyatnya. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat menjadi krusial untuk menilai apakah program ini benar-benar lahir dari pemimpin terpilih kepada rakyatnya. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat menjadi krusial untuk menilai apakah program ini benar-benar lahir dari kebutuhan riil di lapangan, atau justru hanya merupakan implementasi dari agenda politik yang bersifat top-down. Dengan menggunakan kerangka teori representasi Hanna Pitkin, yang membedakan antara representasi sebagai tindakan simbolik dan representasi yang substantif, penulis ingin menelusuri sejauh mana program ini mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah "Sejauh mana proses perumusan dan pelaksanaan program MBG mencerminkan prinsip-prinsip representasi dalam teori mandat Hanna Pitkin terutama kesesuaian janji politik, pemenuhan kebutuhan rakyat dan pelaksanaan kebijakan?"

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif-analitik. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan data yang diperoleh dari berbagai literatur secara deskriptif, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk mendapatkan hasil data yang optimal (Abdussalam, 2021). Penelitian ini tidak melibatkan kerja lapangan, melainkan berfokus pada kajian literatur dari buku, jurnal, situs web, dan sumber literatur lainnya (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Nasution, 2023).

PEMBAHASAN

1. Awal Mula Makan Bergizi Gratis

Pada tanggal 10 September 2023 Prabowo Subianto menyampaikan misi besarnya jika ia terpilih menjadi presiden Indonesia ke-8 yang terangkum dalam "Program Best Result Fast 2024-2029". Secara garis besar misi ini akan mengedepankan ketahanan

pangan, ketahanan energi, ketahanan air, pengentasan kemiskinan, dan kesehatan beserta farmasi. Salah satu program yang menjadi perhatian banyak pihak adalah makan gratis dan susu gratis karena dianggap memerlukan pendanaan yang besar serta kurangnya tingkat efektivitas atas program ini. Mengutip dari Tempo publish 1 Maret 2024 ada 4 tujuan utama program makan siang bergizi dan susu gratis yang diusung Prabowo pertama adalah mengatasi stunting yang sudah menjadi masalah serius di Indonesia. Prabowo melihat makan siang gratis dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah stunting karena ia berencana memberikan program bantuan gizi pada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia. Kedua adalah meningkatkan gizi dan nutrisi, menurut juru bicara bidang geopolitik, pemuda, olahraga, dan diaspora TKN Prabowo-gobran Hamdan Hamedan berpendapat berdasarkan data dari World Food Programme (WFP) ada sekitar 418 juta siswa secara global yang terbentuk setelah adanya pemberian makan siang gratis. Ketiga meningkatkan prestasi akademik, Hamdan Hamedan mengatakan program pemberian makan siang gratis di beberapa negara terbukti mengurangi persentase absensi dan putus sekolah berdasarkan penelitian "Makan di Sekolah dan Pencapaian Pendidikan: Bukti dari Program Makan Siang di India" bahwa murid yang menerima makan siang gratis memiliki skor bacaan 18% lebih tinggi dari pada siswa yang tidak menerima. Terakhir adalah mengentaskan kemiskinan dengan adanya program makan bergizi gratis Prabowo mengatakan bahwa ekonomi Indonesia setidaknya bisa meningkat sebanyak 1,5-2% karena program ini menggunakan petani lokal sebagai supplier¹.

Sejak dipublikasikan rencana Prabowo mengenai makan bergizi gratis ini banyak pihak yang mengkritik program unggulan Paslon nomor urut 02 tersebut. Publik menilai memerlukan anggaran yang sangat besar serta pengawasan yang ketat untuk terus berjalannya program ini sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa terwujud.

2. Perencanaan Makan Bergizi Gratis

Program makan siang bergizi dan susu gratis yang kemudian berubah menjadi program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan dana sebanyak Rp 15.000 per anak untuk makan siang dan Rp. 3.000 per anak untuk susu. Dengan anggaran seperti itu mungkin akan berbeda di tiap daerah terutama di Jakarta yang dinilai uang sangat kecil dan hanya memungkinkan mendapatkan nasi dan sayur serta protein sedikit. Publik kembali mengkritik anggaran yang diberikan untuk tiap anak pada program ini dengan cara berkunjung ke rumah makan dan mencoba memesan makanan dengan harga serupa. Setelah terpilih dan ditetapkan menjadi Presiden Indonesia anggaran program makan bergizi gratis Prabowo Subianto jatuh di angka Rp. 71 triliun yang mengharuskan alokasi per porsi turun dari Rp. 15.000 menjadi Rp. 10.000. Mengutip dari Detik publish 2 Desember 2024 Hasan Nasbi selaku Komunikasi Kepresidenan melihat dengan uang Rp 10.000 dapat memenuhi kebutuhan gizi dalam makan siang

¹Dwi, A., & Ariyani, R. (2024, March 1). 4 Tujuan Utama Program Makan Siang Gratis ala Prabowo. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/4-tujuan-utama-program-makan-siang-gratis-ala-prabowo-81928>

sejumlah 600-700 kalori dalam satu porsi². Hasbi juga menekankan jumlah uang ini akan disesuaikan dengan kebutuhan gizi jadi bukan dengan uang melainkan berpatokan pada kecukupan gizi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga mengungkapkan bahwa untuk memenuhi anggaran program makan bergizi gratis bisa mencapai Rp. 420 triliun hingga akhir desember 2025. Dengan bengkaknya anggaran yang diperlukan menurut ZulHas pemerintah sedang mengupayakan dana tambahan agar seluruh anak di Indonesia bisa mendapatkan makanan³.

3. Pelaksanaan dan Evaluasi Makan Bergizi Gratis

Pelaksanaan program kerja pemerintah Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan status gizi anak sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anak sekolah untuk menurunkan angka stunting. Program ini bertujuan untuk menyediakan makan siang bergizi gratis bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah terutama di daerah-daerah tertinggal dan rawan pangan. Dalam Pelaksanaanya program kerja ini melibatkan banyak pemangku kepentingan dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, katering lokal hingga pengajar di sekolah. Namun, dalam pelaksanaanya program kerja ini menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Beberapa wilayah memberikan laporan bahwa makanan yang disajikan sudah dalam keadaan basi dan tidak layak dikonsumsi yang diasumsikan dikarenakan lemahnya pengawasan dalam hal distribusi. Ketidakmerataan sistem distribusi juga menjadi kendala utama, dimana daerah-daerah terpencil belum bisa melaksanakan program kerja makan bergizi gratis ini dikarenakan akses jalan dan logistik. Keterbatasan anggaran pun tidak luput menjadi perhatian. beberapa masalah yang didapatkan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) ini adalah

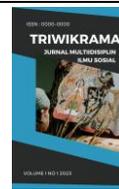
A. Anggaran dan Sumber Dana

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan pemerintah mengalami kendala besar terkait anggaran. Pada tahun pertama pelaksanaan program ini, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp.71 Triliun anggaran ini sudah setara dengan belanja infrastruktur dan hampir menyamai anggaran perlindungan sosial dalam anggaran pendapatan (APBN) 2025 bahkan total kebutuhan dana untuk program ini terus bertambah diperkirakan mencapai Rp. 400 triliun⁴

²Hikam, H. a. A. (2024, December 2). Anggaran Makan Bergizi Gratis Tetap Rp 71 Triliun meski Jadi Rp 10 Ribu/Porsi. *Detikbali*.<https://www.detik.com/bali/berita/d-7666584/anggaran-makan-bergizi-gratis-tetap-rp-71-triliun-meski-jadi-rp-10-ribu-porsi>

³Arief, T. M. V. (2025, January 7). Zulhas Ungkap Anggaran program makan Gratis tembus Rp 420 triliun. *KOMPAS.com*.<https://money.kompas.com/read/2025/01/07/133443626/zulhas-ungkap-anggaran-program-makan-gratis-tembus-rp-420-triliun#:~:text=Badan%20Gizi%20Nasional%20memperkirakan%20kebutuhan,alokasi%20awal%20Rp%2071%20triliun.&text=Pemerintah%20telah%20memulai%20program%20makan,sudah%20install%20aplikasi%20WhatsApp%20ya.&text=tambah%20lagi%20lahan%20korupsi.,sama%20si%20orangtua%20murid%20saja>

⁴Artikel :: *EVALUASI ATAS PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI GRATIS*. (n.d.-b).<https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/evaluasi-atas-pelaksanaan-pemberian-makan-bergizi-gratis-177903>



Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan usulan awal anggaran program yaitu sebesar Rp. 460 Triliun yang mencerminkan tantangan fiskal yang besar. Pemerintah akan menghadapi beban hutang yang besar sekitar Rp. 800,33 Triliun dan subsidi energi sebesar Rp. 204,5 Triliun pada tahun 2025 sehingga ruang fiskal akan semakin terbatas. Meskipun target dari program ini menjangkau sampai 19,47 juta jiwa termasuk anak sekolah dan ibu hamil, namun fakta dilapangan cakupan masih jauh lebih kecil dibandingkan target awal yaitu 83 juta jiwa⁵

Untuk menutupi kekurangan fiskal pemerintah berencana meningkatkan dana dari penerimaan pajak dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Peningkatan penerimaan pajak akan dilakukan dengan mengoptimalkan pemungutan pajak, rasio pajak Indonesia yang tergolong masih rendah dibandingkan negara lain. Saat ini rasio pajak Indonesia di angka 10% sementara Malaysia dan Thailand masing-masing 12% dan 16%⁶. Strategi tersebut dilakukan dengan harapan bahwa dana dapat dialihkan kepada program makan bergizi gratis.

Strategi untuk memberikan tambahan biaya⁷ kepada program makan bergizi gratis melalui peningkatan rasio pajak dan pengurangan subsidi BBM patut menjadi perhatian serius. Rancangan anggaran biaya yang menyentuh angka Rp 71 Triliun pada tahun pertama pelaksanaan telah membebani struktur fiskal negara. Terutama prediksi dengan terus meningkatnya kebutuhan anggaran semakin mencerminkan tantangan fiskal yang besar di tengah ruang anggaran. Di sisi lain, target penerima yang mencakup sasaran 83 juta jiwa menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas dan keadilan distribusi. Peningkatan penerimaan pajak dan mengurangi subsidi BBM juga menimbulkan kekhawatiran baru bagi masyarakat terutama golongan berpenghasilan rendah.

Selain itu, strategi menaikkan penerimaan pajak di tengah rasio pajak Indonesia yang masih rendah—yakni 10% dibandingkan Malaysia (12%) dan Thailand (16%)—dapat menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan sektor usaha, serta masyarakat umum, jika dilakukan tanpa perbaikan sistem perpajakan yang menyeluruh dan adil.

B. Pentingnya Regulasi dan Pedoman Evaluasi Gizi

Salah satu aspek penting dalam program makan bergizi gratis ini adalah evaluasi gizi untuk mengukur efektivitas pemberian makanan terhadap peningkatan status gizi penerima manfaat. Namun, evaluasi ini belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Akibatnya sekolah-sekolah yang berperan sebagai pelaksana program harus menginisiasi sendiri evaluasi terhadap kualitas gizi yang diterima siswa tanpa dukungan dan pedoman resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

⁵ Anggraeni, R., & Jatmiko, L. D. (2025, February 6). Penerima manfaat MBG Prabowo baru 0,8% per 6 Februari 2025, target 82,9 juta. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250206/12/1837560/penerima-manfaat-mbg-prabowo-baru-08-per-6-februari-2025-target-829-juta>

⁶ Yolanda, A. A. ANGGARAN MAKAN BERGIZI GRATIS: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGELOLAAN APBN

⁷ Aji, W. T. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(2), 300-311.

Hal ini menyebabkan tidak akuratnya dan tidak seragamnya metode evaluasi serta kesulitan dalam memantau perkembangan gizi siswa. Penelitian dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)⁸ menunjukkan bahwa akses terhadap regulasi dan petunjuk teknis Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terbatas, menyulitkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam berpartisipasi efektif.

Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah melalui BGN berkomitmen untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan setiap hari untuk memastikan kualitas dan efektivitas program. Selain itu, Juru Bicara Kantor Kepresidenan, Adita Irawati, mengatakan bahwa masukan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi dasar bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi yang mencakup beberapa aspek seperti pemilihan menu, bahan makanan, dan jadwal pengantaran makanan bergizi gratis. Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional juga melakukan kerja sama dengan Puskesmas setempat untuk menilai status gizi siswa. Setelah tiga bulan, status gizi siswa akan dievaluasi untuk melihat dampak program. Namun, tanpa mekanisme evaluasi yang jelas dan terstandarisasi, sulit untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan bernilai akurat dan valid.

Untuk meningkatkan efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), diperlukan regulasi dan pedoman evaluasi gizi yang jelas dari Badan Gizi Nasional. Hal ini untuk memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki acuan yang sama dalam melakukan evaluasi dan data yang dihasilkan dapat digunakan untuk perbaikan program secara berkelanjutan.

C. Variasi Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak memenuhi standar gizi

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi kritik terkait kualitas dan variasi makanan yang disajikan. Beberapa evaluasi terkait variasi dan kualitas makanan yang disediakan tidak sepenuhnya memenuhi standar gizi seimbang. Misalnya menu yang disajikan lebih didominasi oleh karbohidrat tanpa memastikan kecukupan protein, vitamin, dan mineral yang esensial bagi pertumbuhan anak.

Keterbatasan dalam pengelolaan bahan baku dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan penyedia makanan turut berkontribusi dalam kendala ini. Beberapa sekolah di wilayah terpencil mengaku kesulitan dalam mendapatkan bahan makanan bergizi dikarenakan kesulitan dalam akses terbatas dan biaya distribusi yang tinggi. Hal ini menimbulkan kendala mengenai menu yang disajikan berbeda dengan rencana awal dan tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Pelaksanaan program makanan bergizi di beberapa daerah juga dianggap belum maksimal dan merata. Beberapa penyedia makanan yang baru bergabung dalam program Makan Bergizi

⁸Soroti Makan Bergizi Gratis, CISDI Bagikan Catatan Kritis Mengenai Tata Kelola dan Regulasi Program. (2025, February 16). [cisdi.org. https://cisdi.org/siaran-pers/catatan-kritis-tata-kelola-mbg](https://cisdi.org/siaran-pers/catatan-kritis-tata-kelola-mbg)

Gratis (MBG) belum terbiasa untuk memasak dalam jumlah yang besar sehingga terjadi kelalaian dalam pengolahan bahan makanan. Akibatnya, ditemukan permasalahan makanan yang sampai ke sekolah dalam kondisi tidak layak dikonsumsi.

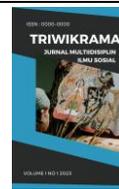
Keterlambatan distribusi makanan turut menjadi faktor dalam buruknya kondisi makanan. Jika makanan terhambat sampai tepat waktu dikarenakan akses distribusi yang sulit maka kandungan gizi dan kualitasnya akan menurun dan berpotensi terkontaminasi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan dan distribusi yang tepat waktu sangat penting untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Untuk mencapai keberhasilan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperlukan peningkatan dalam pengelolaan bahan baku, koordinasi antar penyelenggara serta pengawasan kualitas makanan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan variasi makanan yang disajikan, sehingga tujuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia.

Teori mandat yang dikemukakan oleh Hanna Pitkin dalam bukunya *The Concept of Representation* menekankan bahwa representasi politik merupakan hubungan antara wakil (*representative*) dan yang diwakili (*the represented*), dimana wakil memiliki kewajiban untuk menjalankan kehendak rakyat yang telah memberikan mandat melalui proses demokrasi yaitu pemilu. Dalam teori ini mandat bukan hanya sekedar simbol politik, tetapi juga merupakan bentuk pertanggung jawaban politik terhadap janji yang disampaikan kepada publik.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi program yang dasarnya merupakan bentuk pemenuhan mandat rakyat, terutama dalam hal pemenuhan hak dasar atas pangan dan gizi bagi peserta didik. Namun, berdasarkan uraian diatas tahap implementasi dari program ini masih menunjukkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan antara janji politik dan realisasi kebijakan menurut hanna pitkin yang dapat melemahkan substantif dari representasi politik. Jika wakil rakyat atau pemerintah yang memperoleh mandat gagal melaksanakan program dengan baik, maka mandat tersebut menjadi tidak bermakna dalam praktik. Representasi yang ideal seharusnya tidak berhenti sesudah pemilu tetapi harus dilanjutkan dengan tanggung jawab moral dan pelaksanaan administratif yang terstruktur. Oleh karena itu, merujuk kepada teori mandat Hanna Pitkin, kebijakan pelaksanaan MBG ini perlu dikaji ulang secara menyeluruh. Evaluasi ini penting agar program tidak hanya menjadi simbol politik semata, tetapi benar benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mencerminkan esensi dari representasi politik.

CONCLUSION

Dalam konteks teori mandat dari Hanna Pitkin, pemerintah sebagai representasi dari mandat rakyat, memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan ini secara efektif demi kepentingan masyarakat luas. Prinsip representatif dalam teori mandat menekankan bahwa



perwakilan bertanggung jawab untuk merealisasikan janji politiknya dengan memastikan program ini berjalan sesuai tujuan dan memenuhi kebutuhan rakyat secara merata. Dalam hal ini, pemerintah harus menunjukkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap kritik dan tantangan, sekaligus memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program. Pemerintah berupaya mengatasi hambatan ini dengan memperkuat regulasi, meningkatkan sistem evaluasi, serta mencari pendanaan tambahan melalui kenaikan pajak dan pengurangan subsidi BBM, meskipun langkah ini memunculkan kekhawatiran di masyarakat. Program MBG ini memerlukan pengkajian yang matang, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Setiap aspek dari kebijakan ini harus dirancang berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kebutuhan masyarakat, potensi dampak sosial-ekonomi, dan kesiapan infrastruktur. Proses evaluasi yang ketat juga diperlukan untuk memastikan program ini berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang diinginkan, sekaligus mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif.
- Aji, W. T. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(2), 300-311.
- Arief, T. M. V. (2025, January 7). Zulhas Ungkap Anggaran program makan Gratis tembus Rp 420 triliun. *KOMPAS.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/01/07/133443626/zulhas-ungkap-anggaran-program-makan-gratis-tembus-rp-420-triliun#:~:text=Badan%20Gizi%20Nasional%20memperkirakan%20kebutuhan,alokasi%20awal%20Rp%2071%20triliun.&text=Pemerintah%20telah%20memulai%20program%20makan,sudah%20install%20aplikasi%20WhatsApp%20ya.&text=tambah%20lagi%20lahan%20korupsi.,sama%20si%20orangtua%20murid%20saja>
- Artikel :: *EVALUASI ATAS PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI GRATIS*. (n.d.-b). <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/evaluasi-atas-pelaksanaan-pemberian-makan-bergizi-gratis-177903>
- Bloom, D. E., Canning, D., & Chan, K. (2011). *Higher Education and Economic Development in Africa*. World Bank.
- Dwi, A., & Ariyani, R. (2024, March 1). 4 Tujuan Utama Program Makan Siang Gratis ala Prabowo. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/4-tujuan-utama-program-makan-siang-gratis-ala-prabowo-81928>
- Ferguson, E. L., et al. (2015). *The role of food security in nutrition*. *Journal of Nutrition*, 145(4), 767-773.
- Fowler, A. (2013). *The role of community participation in sustainable development*. *Development in Practice*, 23(1), 15-27.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Program Makanan Sekolah. Jakarta: Kemdikbud.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo



- Maharani, P. A., Namira, A. R., & Chairunnisa, T. V. (2024). Peran makan siang gratis dalam janji kampanye prabowo gibran dan realisasinya. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 1-10.
- Merlinda, A. A., & Yusuf, Y. (2025). Analisis Program Makan Gratis Prabowo Subianto Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Tinjauan dari Perspektif Sosiologi Pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1364-1373.
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Pritchett, L., & Woolcock, M. (2004). *Solutions When the Solution Is the Problem: Arraying the Disarray in Development*. *World Development*, 32(2), 191-212.
- Qomarrullah, R., Suratni, S., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130-137.
- Ritonga, A. R., & Sazali, H. (2025). Analisis Komunikasi Pembangunan Terhadap Regulasi dan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis. *Vijnana: Jurnal Hasil Penelitian Multidisiplin*, 1(1), 32-40.
- Septiani, F. I., Rosiana, N., & Azzahra, A. (2024). Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *JUPENSAL: Jurnal Pendidikan Universal*, 1(2), 191-196.
- Smith, L. C., & Haddad, L. (2015). *Reducing Child Undernutrition: How Far Does Income Growth Take Us?* *World Bank Research Observer*, 30(1), 76-100.
- Yolanda, A. A. ANGGARAN MAKAN BERGIZI GRATIS: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGELOLAAN APBN.